

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) studi kasus pada puskesmas Sonder Kabupaten Minahasa

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 447-453
DOI: 10.58784/rapi.367

Febrinly Ezra Wewengkang
Corresponding author:
Febrinlywe@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Agus Tony Poputra
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 14 August 2025
Revised 6 September 2025
Accepted 8 September 2025
Published 9 September 2025

ABSTRACT

The Health Operational Assistance Fund (BOK) is a government program designed to support promotive and preventive health services at community health centers (Puskesmas). This study aims to evaluate the accountability and transparency in managing BOK funds at Sonder Health Center, Minahasa Regency. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that the accountability of BOK fund management has been implemented in accordance with the Ministry of Health's technical guidelines and reporting mechanisms. However, transparency is still limited, as information disclosure remains primarily internal and has not been fully accessible to the public. These results highlight the need for strengthening public participation, improving administrative capacity, and enhancing communication strategies to ensure better governance of public health financing. The study contributes to the discourse on public financial management by emphasizing the importance of transparency and accountability in local health governance.

Keywords: accountability; transparency; public financial management; health Operational Assistance Fund (BOK)
JEL Classification: H51; H83

©2025 Febrinly Ezra Wewengkang, Agus Tony Poputra



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat vital untuk menjalani kehidupan yang produktif dan sejahtera. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan. Dalam konteks pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas berperan

sebagai ujung tombak pemerintah dalam memberikan layanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

Untuk menunjang operasional Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menyediakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dana ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai program kesehatan yang bersifat promotif

dan preventif, guna menurunkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akan tetapi, permasalahan akuntabilitas (Naftalin dan Ayuningtyas, 2020; Hadi et al., 2025) dan transparansi dalam pengelolaan dana ini masih sering ditemukan.

Pengelolaan dana publik, termasuk dana BOK, tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga merupakan implementasi prinsip *good governance*. Dua prinsip utama yang menjadi tolok ukur dalam tata kelola dana publik adalah akuntabilitas dan transparansi. (Purnomo dan Putri, 2018; Silvia dan Myrna, 2023; dan Rachman et al. (2022); Rahmayani dan Revida, 2025). Tanpa transparansi dan akuntabilitas maka para pihak yang terlibat sering saling menyalahkan (Ran and Jian, 2021). Namun sering terjadi antara lain penggunaan dana publik tidak sesuai peruntukan, pelaporan yang tidak tepat waktu, serta kurangnya akses informasi kepada publik. Beberapa penelitian yang menemukan hal tersebut di antaranya Sitorus et al. (2025), and Gaspar et al. (2022). Namun, Pratiwi et al. (2023) menemukan hal sebaliknya dalam penelitian mereka.

Secara teoritis, akuntabilitas dan transparansi saling berkaitan erat. Akuntabilitas yang kuat tidak akan optimal tanpa adanya transparansi, dan sebaliknya, transparansi tanpa akuntabilitas hanya akan menjadi formalitas administratif (Ran & Jian, 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan hasil: ada yang menemukan lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana publik (Sitorus et al., 2025; Gaspar et al., 2022), sementara lainnya menemukan praktik yang cukup baik (Pratiwi et al., 2023).

Dengan demikian, kerangka logika penelitian ini dibangun atas pemahaman bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan dua dimensi penting dalam pengelolaan dana BOK. Evaluasi terhadap kedua aspek ini pada Puskesmas Sonder akan memberikan gambaran mengenai

sejauh mana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sudah diterapkan di tingkat layanan kesehatan dasar. Temuan penelitian diharapkan tidak hanya memperkuat literatur akuntabilitas publik di sektor kesehatan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola dana BOK di wilayah lain.

2. Tinjauan pustaka

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, prinsip ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 yang mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya berfokus pada output keuangan, tetapi juga pada proses bagaimana anggaran dikelola, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Sementara itu, transparansi menuntut keterbukaan informasi agar masyarakat memiliki akses terhadap data dan laporan yang relevan. Prinsip ini sejalan dengan semangat *open government* dan regulasi keterbukaan informasi publik. Dalam konteks sektor kesehatan, transparansi tidak hanya terkait laporan keuangan, tetapi juga mengenai pelaksanaan program kesehatan yang dibiayai oleh negara.

Salah satu pendekatan terkait akuntabilitas dan transparansi adalah pendekatan *New Public Management*, pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam birokrasi modern. Akuntabilitas tidak hanya pada pelaporan administratif, tetapi juga pada kinerja, *outcome*, dan kepuasan masyarakat.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui APBN kepada puskesmas untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif (Permenkes No. 11 Tahun 2015). Prinsip dasar pengelolaan BOK meliputi efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Tujuan BOK adalah memperkuat layanan kesehatan primer melalui pendanaan operasional yang memadai, sehingga program kesehatan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Namun, implementasi BOK sering menghadapi tantangan, misalnya keterlambatan penyaluran, keterbatasan kapasitas SDM puskesmas, hingga kendala dalam pertanggungjawaban keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan praktik di lapangan.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOK (BOK) pada konteks spesifik, yaitu Puskesmas Sonder, Kabupaten Minahasa.

Lokasi penelitian adalah Puskesmas Sonder, Kabupaten Minahasa, yang dipilih karena:

1. Merupakan salah satu penerima dana BOK dengan cakupan layanan masyarakat luas,
2. Memiliki peran penting dalam pelaksanaan program promotif dan preventif,
3. Menghadapi tantangan administratif dan teknis yang relevan dengan fokus penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari kepala puskesmas, bendahara, pengelola dana BOK, kader kesehatan, dan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pihak

yang terkait langsung dalam mekanisme pengelolaan dana.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan model Miles et al. (2014) yang meliputi:

1. Reduksi data, memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks tematik.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan mengaitkan temuan dengan teori tata kelola (*good governance*) dan penelitian terdahulu.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting menyangkut akuntabilitas, transparansi dan Pengelolaan Dana BOK sebagai berikut:

1) Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sonder telah menunjukkan bentuk akuntabilitas yang cukup baik. Dana yang diterima dikelola oleh bendahara dan staf yang ditunjuk, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Setiap kegiatan yang didanai BOK dipertanggungjawabkan melalui laporan triwulanan yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Selain itu, adanya dokumentasi dan pengawasan internal menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur.

2) Transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

Transparansi dalam pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sonder dijalankan

melalui kegiatan Mini Lokakarya (MINLOK), yang rutin dilakukan untuk merancang dan mengevaluasi program kerja. Namun demikian, penyampaian informasi kepada publik masih belum optimal. Informasi tentang alokasi dan penggunaan dana belum dipublikasikan secara luas melalui media seperti papan informasi atau media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterbukaan dalam lingkup internal, akses masyarakat umum terhadap informasi masih terbatas.

3) *Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan*

Pengelolaan dana BOK dilakukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan yang telah disusun dan disetujui sebelumnya. Dana digunakan untuk kegiatan promotif dan preventif seperti penyuluhan, kunjungan rumah, pelatihan kader kesehatan, dan pembelian bahan edukasi. Semua kegiatan dilaksanakan oleh tim Puskesmas dengan mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah kerja. Namun, proses pencairan dana yang terkadang terlambat dari pusat menjadi salah satu hambatan teknis dalam pelaksanaan program secara tepat waktu.

4) *Pelaporan dana Bantuan Operasional Kesehatan*

Pelaporan penggunaan dana BOK dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu per triwulan dan disertai dengan bukti-bukti fisik seperti kwitansi dan dokumentasi kegiatan. Proses pelaporan juga melibatkan evaluasi kegiatan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Walaupun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam kelengkapan administrasi dan pelatihan petugas agar kualitas pelaporan semakin baik dan akurat.

Pembahasan

1) *Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan*

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sonder tercermin melalui sistem pertanggungjawaban yang sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan dana telah dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi secara internal melalui laporan triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas formal telah berjalan, meskipun masih ada tantangan dalam hal keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan sumber daya manusia.

Akuntabilitas pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sonder telah berjalan sesuai regulasi. Hasil sejalan dengan temuan Noviani dan Gani (2024). Namun, keterlambatan pencairan dana menjadi faktor eksternal yang menghambat akuntabilitas program. Temuan ini menguatkan pandangan Silvia & Myrna (2023) bahwa akuntabilitas anggaran publik tidak hanya ditentukan oleh internal organisasi, tetapi juga bergantung pada mekanisme birokrasi yang lebih luas.

2) *Transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan*

Transparansi di Puskesmas Sonder lebih banyak terjadi di lingkup internal, khususnya dalam pelaksanaan mini lokakarya (MINLOK) yang melibatkan seluruh staf. Namun, transparansi kepada publik masih kurang optimal. Informasi terkait penggunaan dana belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga keterlibatan dan pengawasan masyarakat menjadi minim. Penyebab di antaranya adalah persoalan sumber daya dan komunikasi antar organisasi. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Gedeona dan Kurnia (2016). Hal ini menjadi catatan penting untuk diperbaiki karena transparansi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik.

Transparansi di Puskesmas Sonder masih terbatas pada lingkup internal. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Pratiwi et al. (2023) yang menemukan adanya praktik transparansi publik di Puskesmas Bulili. Rendahnya publikasi informasi penggunaan dana di Sonder menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip transparansi sebagaimana disarankan Ran & Jian (2021). Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi indikasi bahwa transparansi belum sepenuhnya terwujud sebagai bagian dari tata kelola partisipatif.

3) *Sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan*

Pelaporan dana BOK telah dilakukan secara berkala dan menggunakan format standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat kendala dalam hal kelengkapan dokumen dan pemahaman teknis staf dalam menyusun laporan. Perlu adanya pelatihan dan penguatan kapasitas staf agar pelaporan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan program. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Khairunnisa dan Arifin (2024) dan Ponno et al. (2024).

Dari sisi pelaporan, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Khairunnisa dan Arifin (2024) yang menekankan perlunya penguatan kapasitas staf agar laporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat menjadi instrumen evaluasi yang substantif. Dengan demikian, sistem pelaporan di Puskesmas Sonder perlu diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas program, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal.

4) *Evaluasi kegiatan dana Bantuan Operasional Kesehatan*

Kegiatan yang didanai oleh BOK dievaluasi melalui laporan pertanggungjawaban dan kegiatan monitoring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas penggunaan dana,

dan Puskesmas Sonder telah cukup aktif dalam melaksanakan hal ini. Namun, umpan balik dari masyarakat sebagai penerima manfaat masih belum menjadi bagian integral dalam evaluasi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa walaupun akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sonder berjalan cukup baik, namun transparansi masih menjadi tantangan utama. Rendahnya keterbukaan informasi kepada publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi yang lebih terbuka, serta mekanisme pengawasan masyarakat yang lebih partisipatif. Penerapan prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas dan transparansi, merupakan kunci dalam pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien.

5. **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal mengenai dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

1. Akuntabilitas pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sonder telah berjalan sesuai petunjuk teknis dan mekanisme pelaporan, namun masih terhambat oleh keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan kapasitas SDM.
2. Transparansi masih terbatas pada lingkup internal, sehingga akses publik terhadap informasi penggunaan dana belum optimal.
3. Sistem pelaporan telah diterapkan secara rutin, tetapi kualitas administrasi dan pemahaman teknis staf masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan.
4. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum terbangun secara memadai, sehingga diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih efektif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan literatur mengenai tata kelola dana kesehatan di tingkat puskesmas, dengan menekankan pentingnya integrasi

akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas administrasi staf puskesmas, penggunaan media publikasi yang lebih terbuka untuk transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam evaluasi penggunaan dana BOK. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan dana BOK diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dasar.

Daftar pustaka

- Gaspar, M. R., Gabriel, J. P., Manuel, M. B., D.S. Ladrillo, D. S., Gabriel, E. R. (2022). Transparency and accountability of managing school financial resources. *Journal of Public Administration and Governance* 12(2), 102-115.
<https://www.macrothink.org/journal/index.php/jpag/article/view/20146>
- Gedeona, H.T., & D. Kurnia (2016). Implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi* 13(1), 111-138.
<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/75>
- Hadi, S. A., Noerjoedianto, D., Amir, A., Guspianto., & Solida, A. (2025). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Kebun Kopi. *Manuju: Malahayati Nursing Journal*, 7(7), 3150-3164.
<https://doi.org/10.33024/mnj.v7i7.20977>
- Khairunnisa, Said, M., dan Arifin, Z. (2024). Evaluasi kebijakan penerapan mekanisme salur langsung dana bantuan operasional kesehatan puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 19(1), 1-15.
<https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.368>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldafia (2014). *Qualitative data analysis: A method sourcebook*. Edition 3. SAGE Publication Inc.
- Naftalin, F., & Ayuningtyas, D. (2020). Pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan pada Puskesmas Kranji di Kota Bekasi. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 95-103.
<https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.823>
- Noviani, I. H. & Gani, A. (2024). Evaluasi formatif penyerapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Salur Langsung di Kota Depok tahun 2023. *Journal of Mandalika Literature* 6(1), 458-470.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3926>
- Ponno, H., Marampa, A. M., & Ta'dung, Y. L. (2024). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Awan Rantekarua. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(2), 896-901.
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/787>
- Pratiwi, N., Din, M., Masdar, R., Karim, F., Masruddin., & Jurana N. S. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana (BOK) di Puskesmas Bulili di Kota Palu. *JAB* 9(1), 91-103.
<https://doi.org/10.47686/jab.v9i1.583>
- Purnomo., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan kinerja anggaran berkonsep value for money. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 467-476.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14886>
- Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMA Sasama. *Kura Jurnal Ilmiah Akuntansi* 13(3), 73-86.
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/1064>
- Rahmayani, M., & Revida, E. (2025). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pelayanan dana

- bantuan operasional kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Medan. *SAJJANA: Public Administration Review* 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v3i01.21071>
- Ran, R., & Jian, Y. (2021). When transparency meets accountability. *The China Review*, 21(1), 7-36. <https://www.jstor.org/stable/27005553>
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2023). Peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. *Edunomika* 8(01), 1-9. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11145>
- Sitorus, L., Uswatun, H. N., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal* 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>